

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Penghitungan prosentase pencapaian kinerja tersebut adalah :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100	Tidak Tercapai Target	

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai visi misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun. Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) Tahun 2019 sesuai dengan masing-masing sasaran dan indikator kinerja seperti tercantum di bawah ini.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi dalam Penyebaran Informasi yang akurat	Jumlah Aplikasi eGov OPD yang terintegrasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %	Program tatakelola e-government dan infrastruktur jaringan dan komunikasi	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik	19 %	19%	100%
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	15 KIM	15 KIM	100 %	Program tatakelola e-government dan infrastruktur jaringan dan komunikasi	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik	19 %	19%	100%
	Jumlah OPD yang dinilai dengan indeks keamanan informasi (Indeks KAMI/ISO	2 OPD	2 OPD	100 %	Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah melakukan pengklasifikasian informasi	27,87 %	26,5 %	90%

3.2. Analisa capaian kinerja

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

3.2.1. Kinerja Bidang Aplikasi Informatika

Aplikasi informatika atau e-Government adalah merupakan prioritas utama bagi pemerintah daerah, karena dengan penggunaan teknologi informasi maka pemerintah daerah mampu memberikan transparansi informasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan e-Government akan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, menciptakan kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik.

Secara kelembagaan Bidang Aplikasi Informatika bertugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Tata Kelola dan ekosistem E-Government, Pengembangan Aplikasi serta Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Bidang Aplikasi Informatika Tahun 2019

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2019 TERHADAP TARGET 2023 (%)
Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi dalam Penyebaran Informasi yang akurat	Jumlah Aplikasi eGov OPD yang terintegrasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %	5 Aplikasi	20 %
Program tatakelola e-government dan infrastruktur jaringan dan	Persentase OPD yang telah mengimplemen tasikan TIK dengan baik	19%	19%	100%	100%	19%

komunikasi						
------------	--	--	--	--	--	--

Kinerja sasaran dan program tersebut sangat didukung oleh kinerja kegiatan sbb :

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika Tahun 2019

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2019 TERHADAP TARGET 2023 (%)
Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah kebijakan yang tersusun	1	1	100%	1	100 %
	Jumlah Aplikasi e- Gov yang dikembangkan	79 Apl	79 Apl	110%	91 Apl	86,81 %
	Jumlah Desa / Kelurahan yang dilatih dalam pemanfaatan TIK	206 desa/kel	206 desa/kel	100%	206 desa/kel	100 %
	Jumlah OPD yang dilatih dalam pemanfaatan TIK	53 opd	53 opd	100%	53 opd	100 %
Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan sarana Prasarana Teknologi Informasi	Jumlah jaringan internet dan sapsras TI yang terpasang dan terpelihara	53 titik	53 titik	100%	53 titik	100 %

Program Tata Kelola E-Government dan Infrastruktur Jaringan TI dan Komunikasi

Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.070.630.050,00 terealisasi sebesar Rp. 1.802.415.677,00 atau 87,5 % dengan Indikator Kinerja persentase OPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik :

Target 19 % (10 OPD) realisasi 19% (10 OPD) antara lain : Bappeda, BPKAD, BKD, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas PPKB dan PPPA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum.

a. Kegiatan Penguatan Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Jumlah anggaran sebesar Rp. 648.050.050,00 terealisasi sebesar Rp. 531.456.500,00 atau 82,01 % dengan Indikator Kinerja :

- Jumlah kebijakan yang tersusun target 1 kebijakan, realisasi 1 kebijakan atau 100 % yaitu kebijakan yang mendukung Tata Kelola E-Government berupa Perbup SPBE Pemerintah Daerah
- Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dengan Target 79 aplikasi dan tercapai 87 aplikasi atau 110 % (merupakan akumulasi jumlah aplikasi setiap tahun)
- Jumlah Desa / Kelurahan yang dilatih dalam pemanfaatan TIK, Target 206 Desa/Kelurahan realisasi 206 Desa/Kelurahan atau 100 %,
- Jumlah OPD yang dilatih dalam pemanfaatan TIK, target 53 OPD realisasi 53 OPD atau 100 %,

Dipergunakan untuk :

Pengembangan /pengembangan aplikasi dengan output sebanyak 5 aplikasi;

- Aplikasi Perencanaan Pembangunan Desa;
- Aplikasi Review SAKIP;
- Aplikasi SIM PKK;
- Aplikasi Pendataan Koperasi;
- Aplikasi Madiun Tourism.

Penyusunan Arsitektur SPBE Tahun 2019-2023 melalui kerjasama dengan BPPU ITS Surabaya dengan output sejumlah 7 Dokumen :

- Dokumen Kondisi Eksisting;
- Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan –
- Informasi dan Arsitektur SPBE;
- Arsitektur Infrastruktur;
- Arsitektur Keamanan;
- Arsitektur Pelayanan;
- Prioritisasi, Peta Rencana dan Anggaran SPBE;
- Ringkasan Eksekutif.

Pelatihan SDM di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai berikut :

- Uji Kompetensi (21 Orang);
- Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA) (5 Orang);
- Pengelolaan Keamanan Jaringan'Building Web Application with PHP & MYSQL (5 Orang).

Pelatihan Sistem Informasi Manajemen PKK pada 206 Desa / Kelurahan Se-Kabupaten Madiun dengan peserta Tim Penggerak PKK Desa dan Kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2019.

Belanja Tenaga Teknisi Komputer.

b. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Sarana prasarana Teknologi Informasi

Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.422.580.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.270.959.177,00 atau 89,34 % dengan Indikator Kinerja

Jumlah jaringan internet dan saptas TI yang terpasang dan terpelihara, target 53 titik dan tercapai 53 titik atau 100%

Dipergunakan untuk :

- Pembayaran biaya Internet di semua OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Pemeliharaan Jaringan dan Ruang Server;
- Pelayanan SMS terpadu;
- Belanja jasa tenaga ahli.







3.2.2. Kinerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Secara kelembagaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Kemitraan

dan Komunikasi Publik, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta Media Publik.

Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi dalam Penyebaran Informasi yang akurat	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	15 KIM	15 KIM	100 %	Program tatakelola e-Government dan infrastruktur jaringan dan komunikasi	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik	19%	19 %	100%

Kinerja sasaran dan program tersebut sangat didukung oleh kinerja kegiatan sbb :

Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2019

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2019 TERHADAP TARGET 2023 (%)
Penyelenggaraan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah informasi pemerintah daerah yang dipublikasi advertorial pada media masa	150 berita (ADV)	290 berita (ADV)	193,33 %	150 berita (ADV)	193,33%
	Jumlah wartawan yang ikut desiminasi	73 org	73 org	100%	100 org	73 %
Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dok	2 dok	200%	1 dok	200 %
	Jumlah dialog interaktif	10 kali	8 kali	80%	10 kali	80%
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kebijakan PPID yang tersusun	53 titik	53 titik	100%	53 titik	100 %
	Jumlah sosialisasi yang terlaksana	15 KIM	18 KIM	105%	120 KIM	15 %

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.535.953.955,00 terealisasi sebesar Rp. 1.375.820.222,00 atau 89,5 % dengan Indikator Kinerja :
- Jumlah informasi yang di publikasikan melalui media masa Target 300 informasi realisasi 300 informasi atau 100 %,

a. Kegiatan Penyelenggaraan Kemitraan Komunikasi Publik

Jumlah anggaran sebesar Rp. 975.660.000,00 terealisasi sebesar Rp. 974.607.500,00 atau 99,89 % dengan Indikator Kinerja :

- Jumlah informasi pemerintah daerah yang dipublikasi advertorial pada media masa target 150 berita (ADV) realisasi 290 berita (ADV) atau 193,33 %.
- Jumlah wartawan yang ikut desiminasi target 73 orang realisasi 73 orang atau 100 %

b. Kegiatan Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM

- Jumlah anggaran sebesar Rp. 112.000.055,00 terealisasi sebesar Rp.110.505.322,00 atau 98,67 % dengan Indikator Kinerja :
- Jumlah dokumen yang tersusun target 1 dokumen realisasi 2 dokumen atau 200 %, dalam bentuk SK Dewan Pengawas dan SK Dewan Direksi LPPL Puroboyo FM.
- Jumlah dialog interaktif target 10 kali realisasi 8 kali atau 80%, dipergunakan untuk dialog interaktif tentang informasi Pemerintah Daerah oleh OPD terkait

c. Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

- Jumlah anggaran sebesar Rp. 259.163.900,00 terealisasi sebesar Rp. 105.693.900,00 atau 40,78 % dengan Indikator Kinerja :
- Jumlah kebijakan PPID yang tersusun target 1 dokumen realisasi 1 dokumen atau 100 %, dipergunakan untuk penyusunan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- Perbup ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Surat Keputusan (SK) tentang PPID Pembantu sebanyak 64 SK
- Jumlah sosialisasi yang terlaksana target 15 KIM realisasi 18 KIM atau 105 %, sosialisasi tentang KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran sebesar Rp. 189.130.000,00 terealisasi sebesar Rp. 185.013.500,00 atau 97,82 % dengan Indikator Kinerja Jumlah informasi melalui media luar ruang target 52 buah realisasi 93 buah atau 184%. Dipergunakan untuk :

Cetak spanduk sebanyak 32 buah, cetak Baliho sebanyak 45 buah, cetak Backgroun sebanyak 16 buah dan kelender 1.850 eksemplar





Permasalahan

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)yang memiliki Kompetensi teknis di bidang Persandian khususnya Sandiman
- Keahlian Sumber Daya Manusia di bidang Persandian terbatas
- Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kompetensi teknis di bidang TIK pada Diskominfo khususnya dan di semua OPD pada umumnya;
- Masih minimnya sarana prasarana di bidang TIK dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Masih terkendalanya masalah perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puruboyo FM.

Solusi

- Perekrutan atau Pengadaan ASN yang mempunyai basic di bidang Persandian (Sandiman)
- Perlu Dilakukan Pelatihan Sumber Daya Manusia Di bidang Persandian (Sandiman).

- Menyusun program – program pelatihan bagi ASN, yang difokuskan pada peningkatan kemampuan di bidang teknologi informasi (IT) untuk ASN di lingkup Diskominfo dan semua OPD;
- Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, serta penyediaan tenaga ahli di bidang TIK;
- Penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan TIK.
- Percepatan proses perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puruboyo FM dan menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku.

3.2.3. Kinerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Peran persandian dan keamanan informasi berada, sebagai entitas pengaman informasi. Persandian harus mampu memberi jaminan keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah.

Secara kelembagaan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi yaitu menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi dalam Penyebaran Informasi yang akurat	Jumlah OPD yang dinilai dengan indeks keamanan informasi (Indeks KAMI/ISO 27001)	2 OPD	2 OPD	100 %	Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah melakukan pengklasifikasian informasi	27,87 %	26,5 %	90%

Kinerja sasaran dan program tersebut sangat didukung oleh kinerja kegiatan sbb :

Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja Kegiatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Tahun 2019

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2019 TERHADAP TARGET 2023 (%)
Penyusunan Perencanaan, Kebijakan dan Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Kebijakan yang disusun	1 dok	1 dok	100 %	-	-
Pengelolaan Sumber Daya Persandian Meliputi SDM Materiil Sandi dan Klasifikasi Informasi	Jumlah OPD yang sudah melakukan pengklasifikasian informasi	53 OPD	24 OPD	45,2 %	-	-
Operasional Pengaman Informasi Persandian dan Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Kebijakan yang disusun	1 Dok	1 Dok	100%	-	-
	Jumlah sosialisasi yang terlaksana	1 kali	1 kali	100%	5 kali	20 %

Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 371.983.675,00 terelalisasi sebesar Rp. 154.816.000,00 atau 41,62% dengan indikator kinerja : Persentase OPD yang sudah melakukan pengklasifikasian informasi target 27,87 % realisasi 26,5 %

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Kebijakan dan Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Jumlah anggaran sebesar Rp. 156.270.875,00 terealisasi sebesar Rp. 47.954.500,00 atau 30,69 %, dengan Indikator Kinerja :

- Jumlah Kebijakan yang disusun target 1dok relisasi 1 dok

b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Persandian Meliputi SDM Materiil Sandi dan Klasifikasi Informasi

- Jumlah anggaran sebesar Rp. 107.897.050,- terealisasi sebesar Rp. 83.760.000,- atau 77,63% dengan Indikator Kinerja

- Jumlah OPD yang sudah melakukan pengklasifikasian informasi target 53 OPD realisasi 24 OPD atau 45,2 %, antara lain Bagian Umum, Bagian Organisasi, Badan Kesbangpoldagri, Dinas Perhubungan, BPKAD, Kec. Sawahan, Kec. Kare, Kelurahan Pandean, Kelurahan Wungu, PDAM, PD Umbul SQ.

c. Kegiatan Operasional Pengaman Informasi Persandian dan Jaring Komunikasi Sandi

Jumlah anggaran sebesar Rp. 107.815.750,00,- realisasi sebesar Rp. 22.325.000,00,- atau 20,7% dengan Indikator Kinerja :

- Jumlah sosialisasi yang terlaksana target 1 kali realisasi 1 kali atau 100 % yaitu sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR)

3.2.4. Kinerja Bidang Statistik

Dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019, Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis sebagai sistem yang mengatur keterkaitan atas unsur dan penyelenggaraan statistik.

Secara kelembagaan Bidang Statistik mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan Penyajian, Evaluasi dan Pelaporan Data.

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Bidang Statistik Tahun 2019

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Persentase data statistik sektoral yang tersedia dan valid	80%	90%	110%

Kinerja program tersebut sangat didukung oleh kinerja kegiatan sbb :

Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja Kegiatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Tahun 2019

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2019 TERHADAP TARGET 2023 (%)
Kompilasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen statistik sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
Pengembangan Pusat Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
	Jumlah peserta pelatihan	55 orang	70 orang	127,27 %		
Penyusunan Data Statistik Kewilayahan	Dokumen yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	100%		

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Jumlah anggaran sebesar Rp. 319.857.850,00 terealisasi sebesar Rp. 312.681.900,00 atau 97,74% dengan indikator kinerja :

- Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid target 80% dan tercapai 90% atau 113 %

a. Kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral

Jumlah anggaran sebesar Rp. 54.809.800,00 terealisasi sebesar Rp. 52.295.000,00 atau 95% dengan Indikator Kinerja jumlah dokumen statistik sektoral target 1 dokumen (50 buku) tercapai 1 dokumen (50 buku) atau 100%, Dipergunakan untuk penyusunan buku Kompilasi Data Statistik Sektoral

- Kegiatan Penyusunan Data Statistik Kewilayahan

Jumlah anggaran sebesar Rp. 126.828.500,00 terealisasi sebesar Rp. 123.355.850,00 atau 97,26 % dengan Indikator Kinerja :

Jumlah dokumen yang tersusun target 1 dokumen realisasi 1 dokumen atau 100%,

Dipergunakan untuk penyusunan buku Data Statistik Kewilayahan sebanyak 35 buku dan untuk penggandaan buku :

- Kabupaten Madiun Dalam Angka 75 buku.
- Kecamatan Dalam Angka 75 buku.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 40 buku.
- Buku Saku Kabupaten Dalam Angka 55 buku

- **Kegiatan Pengembangan Pusat Data Statistik Sektoral (DID)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 138.219.550,00 terealisasi sebesar Rp. 136.968.050,00 atau 99,09 % dengan Indikator Kinerja :

- Jumlah peserta pelatihan target 55 orang, realisasi 70 orang atau 127,27 %, dipergunakan untuk pelatihan peningkatan SDM pengelola Data Statistik Sektoral
- Dokumen yang tersusun, target 1 Dokumen (25 buku) realisasi 1 Dokumen (25 buku) atau 100 %, dipergunakan untuk penyusunan Buku Pemetaan Kemiskinan.

- **Penyusunan Data Statistik Kewilayahan**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 126.828.500,00 terealisasi sebesar Rp. 123.355.850,00 atau 97,26 % dengan Indikator Kinerja :

Jumlah dokumen yang tersusun target 1 dokumen realisasi 1 dokumen atau 100%,

Dipergunakan untuk penyusunan buku Data Statistik Kewilayahan sebanyak 35 buku dan untuk penggandaan buku :

- Kabupaten Madiun Dalam Angka 75 buku.
- Kecamatan Dalam Angka 75 buku.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 40 buku.
- Buku Saku Kabupaten Dalam Angka 55 buku





Gambar 1.
Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Kompilasi Data Statistik
Sektoral



Gambar 2.
Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pusat Data Statistik
Sektoral

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019, telah dapat dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dengan *performance* kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun :

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator persentase kebutuhan operasional kantor yang terpenuhi dan ketersediaan sarana penunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun kondisi baik. Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 7 (tujuh) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

- Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
 - Penyediaan alat tulis kantor ;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor ;
 - Penyediaan peralatan rumah tangga ;
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ;
 - Penyediaan makanan dan minuman;
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ;
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah ;
 - Penyediaan Jasa penunjang Kinerja SKPD ;
 - Penyediaan Jasa Pengamanan;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
- Pengadaan Peralatan kantor;
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional;
 - Pemeliharaan rutin / berkala alat kantor pendukung (Komputer, printer, AC, dan Mesin Tik);

Target capaian kinerja sasaran dengan 5 (lima) indikator tersebut tercapai rata-rata 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di ketahui bahwa dari target indikator sasaran secara keseluruhan rata-rata sebesar 100% tercapai 92,54%, dengan tingkat capaian kinerja sasaran tercapai 100%. Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori sangat baik. Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adanya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, yaitu : komputer, laptop, printer dan pengadaan mebeulair sehingga dapat menambah tersedianya sarana dan prasarana kerja, tetapi masih diperlukan lebih banyak penambahan sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan guna meningkatkan kelancaran kerja. Selain itu adanya kegiatan penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan juga mendukung kelancaran dalam administrasi kantor, terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2019 sama dengan capaian kinerja tahun 2018, yang juga tercapai 100%. Hal ini dikarenakan anggaran tahun 2019 relatif sama

dengan tahun 2018, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan juga relatif sama.

2. Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator yaitu persentase sarana dan penunjang kegiatan. Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi, dengan kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan perencanaan, kebijakan dan pedoman penyelenggaraan pengamanan informasi;
 - Pengelolaan sumberdaya Persandian, meliputi SDM, materiil, sandi dan klasifikasi informasi;
 - Operasional pengamanan informasi persandian dan jaring komunikasi sandi;

3. Sasaran 2: Tersedianya data statistik Daerah yang akurat dan tepat waktu.

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator tersedianya Buku Kabupaten Madiun Dalam Angka dan Buku PDRB yang tepat waktu. Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu; Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah, terdiri dari kegiatan :

- Kompilasi data Statistik Sektoral;
- Penyusunan data statistik kewilayahan;
- Pengembangan Data Statistik Sektoral (DID);

Target capaian kinerja sasaran dengan indikator tersebut tercapai 100%.

4. Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Jaringan Komunikasi

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator Website milik Pemerintah Daerah dan jumlah Website/Blog milik OPD yang aktif. Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 2 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu; Program tatakelola e-government dan insfrastruktur jaringan dan komunikasi terdiri dari kegiatan :

- a. Penguatan tatakelola teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Pengelolaan infrastruktur jaringan dan sarana prasarana teknologi dan informasi ;

Target capaian kinerja sasaran dengan indikator tersebut tercapai 100%.

6. Sasaran 5 : Melaksanakan Desiminasi Informasi kepada Masyarakat.

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator jumlah Pertemuan dengan Media Massa dan Media Massa Radio. Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan, yaitu; Program Pengembangan Komuniksai, informasi, dan media massa, program Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik, terdiri dari kegiatan:

- a. Penyelenggaraan kemitraan komunikasi Publik;
- b. Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM ;
- c. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- d. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Target capaian kinerja sasaran dengan indikator tersebut tercapai 100%.

1.3. Akuntabilitas Keuangan

NO	URUSAN	ANGGARAN		REALISASI I (%)
		TOTAL	REALISASI	
1	2	3	4	5
A	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
1	Urusan Statistik Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	319.857.850,00	312.618.900,00	97,74%
	a. Kompilasi Data Statistik Sektoral	54.809.800,00	52.295.000,00	95,41%
	b. Penyusunan Data Statistik Kewilayahan	126.828.500,00	123.355.850,00	97,26%
	c. Pengembangan Pusat Data Statistik sektoral (DID)	138.219.550,00	136.968.050,00	99,09%
2	Urusan Persandian Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	371.983.675,00	154.816.000,00	41,62%
	a. Penyusunan perencanaan, kebijakan dan pedoman penyelenggaraan pengamanan informasi;	156.270.875,00	47.954.500,00	30,69%
	b. Pengelolaan sumberdaya Persandian, meliputi SDM, materiil, sandi dan klasifikasi informasi;	107.897.050,00	83.760.000,00	77,63%
	c. Operasional pengamanan informasi persandian dan jaring komunikasi sandi;	107.815.750,00	23.101.500,00	21,43%
3	Urusan Komunikasi dan Informatika Program tatakelola e-government dan infrastruktur jaringan dan komunikasi	2.070.630.050,00	1.802.415.677,00	87,05%

	a. Penguatan tatakelola teknologi informasi dan komunikasi;	648.050.050,00	531.456.500,00	82,01%
	b. Pengelolaan infrastruktur jaringan dan sarana prasarana teknologi dan informasi	1.422.580.000,00	1.270.959.177,00	89,34%
	Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	1.535.953.955,00	1.375.820.222,00	89,57%
	a. Penyelenggaraan kemitraan komunikasi Publik;	975.660.000,00	974.607.500,00	99,89%
	b. Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM ;	112.000.055,00	110.505.322,00	98,67%
	c. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;	259.163.900,00	105.693.900,00	40,78%
	d. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	189.130.000,00	185.013.500,00	97,82%
		4.298.425.530,00	3.645.670.799,00	315,98%

3.4 Efisiensi